

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Agus Salim Andi Gadjong, 2007. *Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan hukum)*, Bogor : Ghalia Indonesia.

Anastasia Diana, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Andi.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Bohari, 2010, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers.

Burhan Ashsofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Djoko Mulyono, 2008, *Pajak Pertambahan Nilai*, Yogyakarta: Andi.

-----, 2009, *PPH dan PPN Untuk Berbagai Kegiatan Usaha*, Yogyakarta: Andi.

Erly Suandy, 2008, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.

Gustian Djuanda Irwansyah Lubis, *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, Jakarta : PT Gramedia.

Mardiasmo, 2013, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi.

Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Hukum Pajak Elemtner Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

-----, 2010, *Hukum Pajak Materil*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

-----,2010,*Hukum Pajak Formal*, Yogyakarta:Graha Ilmu.

Mustaqiem,2014,*Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Indonesia*, Yogyakarta:Buku Litera.

R.Santoso Brotodiharjo,2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung :Refika Aditama,

Ridwan HR,*Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia.

Sri Pudyatmoko,2009,*Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*, Yogyakarta:Andi.

Thomas Sumarsan,2010,*Perpajakan Indonesia*, Jakarta:Indeks.

Untung Sukardji,2014,*Pajak Pertambahan Nilai Edisi revisi 2014*,Jakarta:Rajawali Pers.

Wirawan B.Ilyas dan Richar Burton, 2013, *Hukum Pajak*, Jakarta:Salemba Empat.

Zainuddin Ali,M.A,2009,*Metode Penelitian Hukum*,Jakarta:Sinar Grafika.

KAMUS

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

UNDANG - UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/Pmk.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nomor 80/PMK.03/2012 tentang Jasa Angkutan Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/Pmk.03/2012 Tentang tata cara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 70/Pj/2007 Tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 18/Pj.3/1989 Tentang Pengenaan Ppn Atas Jasa Perusahaan Perjalanan

Surat Edaran Nomor SE-119/PJ/2010 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Umum di Jalan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-321/PJ/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-233/PJ/2012 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

INTERNET

<http://asitasumbar.org>

<https://customclearance.wordpress.com/tag/perdagangan-internasional/>

http://jdih.padang.go.id/peraturan_daerah

<http://www.ortax.org>

<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPPN.pdf>

<http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>

https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi_umum

